



## Pemkot Yogya Gagal Realisasikan Lahan Pengolahan Sampah di Gunungkidul

**YOGYA, TRIBUN** - Kerja sama antar daerah yang diupayakan Pemkot Yogyakarta untuk merealisasikan lahan pengolahan sampah secara mandiri, menemui jalan buntu. Upaya yang sudah ditempuh selama lebih kurang dua tahun terakhir itu, urung membuahkan hasil, sehingga TPA regional Piyungan pun tetap dijadikan "andalan".

Berdasarkan informasi yang diperoleh *Tribun Jogja*, sejak tahun lalu Pemkot Yogya telah menjajaki kerja sama dengan Pemkab Gunungkidul guna merealisasikan lahan pengolahan limbah. Akan tetapi, kabar terkait peninjauan tersebut seolah menguap begitu saja, seiring kesepakatan yang gagal terjalin di antara kedua daerah tingkat dua di DIY itu.

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogya, Singgih Raharjo, menuturkan, pihaknya sudah berupaya mengantisipasi kondisi TPA Piyungan yang *overload* dengan menjajaki lahan di daerah lain. Namun, setelah berusaha selama dua tahun, pihaknya tak kunjung menemui kesepakatan, yang membuat lahan pengolahan sampah pun urung terealisasi.

"Kita sejak dua tahun lalu sudah melakukan peninjauan dengan daerah lain di luar Kota

Yogya, tapi tampaknya belum ada kecocokan. Sudah dua tahun lalu, kita melakukan upaya bagaimana untuk bekerja sama dengan daerah lain," jelasnya, Selasa (29/8).

Singgih merinci, bentuk kerja sama yang ditawarkan Pemkot adalah berupa pembelian atau penyewaan sebuah lahan di daerah lain, untuk kemudian dibangun tempat pengolahan limbah yang bersumber dari wilayahnya. Hal tersebut, tentu menjadi opsi paling realistis bagi Kota Yogyakarta, yang mengalami kendala keterbatasan lahan.

"Sudah dua tahun kami melakukan peninjauan dengan daerah lain. Tapi, tampaknya belum ada kecocokan. Jadi, kita belum menemukan partner yang cocok," imbuh Singgih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DIY, Noviar Rahmad, mengimbau masyarakat agar tidak membakar lahan dan sampah. Sebab ada Perda di tingkat kabupaten/kota masing-masing yang mengatur soal pelanggaran aktivitas pembakaran sampah secara sembarangan. Noviar pun menyerahkan penanganan sanksi pelanggaran tersebut kepada Satpol PP di lima kabupaten dan satu kota se-DIY. **(aka/tro)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005